

## BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR 180-45/134/2020

# TENTANG PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 2 BALANDETE KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020

#### BUPATI KOLAKA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program dan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar di Kabupaten Kolaka, maka perlu pembukaan dan pendirian Unit Sekolah Baru
  - b. bahwa Lembaga SD Negeri 2 Balandete Kabupaten Kolaka telah memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan dan diberikan izin operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 2 Balandete Kabupaten Kolaka.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Kolaka.

#### MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Balandete Kabupaten Kolaka

KEDUA

- Satuan Pendidikan Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ini berkewajiban :
  - Menyelenggarakan Pendidikan dengan Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia
  - Menyampaikan Laporan Secara Berkala Kepada Bupati Kolaka U.P Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA

Keputusan ini mulai Berlaku Sejak tanggal Mulai Menerima Siswa Baru pada Sekolah tersebut, dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 16 Januar 2020

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MINENG NERMANINGSIH NIP. 19670207 199902 2 001 Tempusifi 0

Messari Pendidikan Dan Kabudaysan di Jakarta Sakeriana Jandarai Kambikbud di Jakarta

2 Inspektur Jenderal Hemdikhud di Jakarta

Direktur Junderal Pendidikan Dasar Kemdikhud di Jakarte

5 Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari

Kepula Dinas Pandidikan Dan Kebudayaan Bulawaa Tenggara di Kendan

Fintus DPRD Kabupaten Kolaka di Kelaka
 Inapoktur Describ kabupaten Kolaka di Kelaka

Kepala Dinas Ferdidikan dan Kebudayaan Kabupatan Kulaka di Kulaka